

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, M., & Nurhidayat, S. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out Court System)*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Aminah, S. 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK.
- _____.2015. *An Garda Siochana, Code Of Practice on Access to a Solicitor by Persons in Garda Custody*. Ireland: garda.ie.
- Ansori, L. 2018. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.
- Asshidiqie, J. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* . Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Birk, M. 2011. *Pretrial Detention and Torture: Why Pretrial Detainees Face the Greatest Risk*. New York: Open Society Foundations.
- Budiardjo, M. 1994. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Buku Saku Paralegal Bantuan Hukum adalah Hak Kita*. 2018. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center.
- Darmawan, M. K., & Oli'i, M. I. 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Yayasan Pustaka Onor Indonesia.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. 2004. *Metode: Penelitian Hukum* . Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Donnelly, J. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice* . Ithaca and London: Cornell University Press.
- Effendi, T. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Fajar, D. M., & Achmad, Y. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* . Surabaya: PT. Bina Ilmu.

- Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet. Keenam*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Cetakan Pertama, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadafi, B. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & The Asia Foundation.
- Kaligis, O. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni .
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, cetakan ke-1*. 1991. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuffa, H. 2010. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Kusumaatmadja, M. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum), cet. pertama*. Bandung: PT. Alumni.
- Lubis, M. S. 2010. *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*. Jakarta: PT. Pustaka Buku.
- Lubis, S. 2010. *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Prinsip Miranda Rule*. Yogyakarta: Pustaka Lubis.
- Lubis, T. M. 1993. *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, B. 1996. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai 70 Tahun Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mulyadi, L. 2002. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan) cet. kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, A. B. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Palkamo, J., Viljamaa, H., & Yli Rahnasto, S. 2016. *Legal Aid for Legal Persons. International Judicial Cooperation in Civil Matters- European Civil Procedure.*
- Pandu, Y. 2004. *Klien & Advokat Dalam Praktek.* Jakarta: PT. Abadi.
- Pettanese, S. 1997. *Hukum Acara Pidana.* Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Prodjodikoro, W. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia.* Bandung: PT. Sumur Bandung.
- Purbacaraka, P., & Halim, A. 1982. *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab.* Jakarta: Rajawali.
- Rahardjo, S. 2003. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia.* Jakarta: Kompas.
- Rahayu. 2009. *Pengangkutan Orang Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Diambil kembali dari eprint ums: etd.eprint.ums.ac.id
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi.* Bandung: Sumber Ilmu Jaya.
- Reksodiputro, M. 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusta Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia.
- Saebani, A. 2009. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, R. 1983. *Suatu Orientasi dalam Hukum Pidana.* Jakarta: Aksara Baru.
- Setiono. 2004. *Rule of Law.* Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis cet pertama.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, B. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.* Bandung: Mandar Maju.
- Sunggono, B. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suseno, F. M. 1994. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.* Jakarta: Gramedia.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo.
- Tjitrosoebidio, R. S. 1999. *Kamus Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita.

United Nations Office on Drugs and Crime, Model Law on Legal Aid in Criminal Justice Systems with Commentaries . 2017. Vienna: Publishing and Library Section United Nations Office at Vienna.

UNODC, U. N. *Early Access to Legal Aid in Criminal Justice Processes: A Handbook For Policymakers and Practitioners*.

Voorhout, J. E. 2016. *Ineffective Legal Assistance: redress for the Accused in Dutch Criminal Procedure and Compliance with ECHR Case Law*. Leiden: Brill Hal.

What is Democracy . 1991. United State: United State Information Agency.

Winarta, F. H. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* . Jakarta: Elex Media Komputindo.

Wlas, L. 1989. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Zen, A. P., & Hutagulung, D. 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK.

Jurnal :

Aji, H. Y., & Ilyasa, R. A. (2020). The Existence of The State's Role in Providing Prodeo Legal Aid to Citizens Who Are Not Able Based Law Number 16 of 2011 . *The Indonesian Journal of Internatiional Clinical Legal Education* Vol. 2 No.2 , 111-128.

Cahyadi, I. A. (2014). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum*, .

Daly, Y., & Conway, V. (2021). Selecting a Lawyer: The Practical Arrangement of Police Station Legal Assistance. *Journal of Law and Society*, Vol. 48 No. 4, 618-644.

Bawono, B. T. (2011). Tinjauan Yuridis Hak-hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 245, 550-570.

Dharyanti, D. M. (2018). Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana Oleh Advokat Dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Kertha Patrika* Vol.2, No. 3, 175-185.

Fajarwati, M. (2017). Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahn 2014 tentang Pengajuan Kembali Dalam Perkara Pidana ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 02, Juni 2017, 145-162.

- Fajriando, H. (2020). Revisi UU Bantuan Hukum Demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum. *Jurnal HAM* Vol. 11, No. 3, 467-485.
- Flynn, A. L., Hodgson, J., McCulloch, J., & Naylor, B. G. (2016). Legal Aid and Access to Legal Representation: Redefining the Right to a Fair Trial. *Melbourne University Law Review* Vol. 40 No. 1, 207-239.
- Gayo, A. A. (2020). Optimasilasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 20 No. 3, 409-433.
- Heriyanto. (2022). Comparison of Law in the System of Applying Legal Aid to the Poor in Indonesia (Before and After the Enacting of Legal Aid Law). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 9 No. 2, 140-148.
- Husen, L. O., Sampara, S., & Pasamai, S. (2017). Community Policing is a Study in South Sulawesi. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research* Vol. 3, 1026-1030.
- Intaniasari, K. (2020). Akibat Hukum Para Terdakwa yang Tidak Didampingi Penasehat Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan. *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 2, 55-62.
- Juriloo, K. (2015). Free Legal Aid -a Human Right. *Nordic Journal of Human Rights* , Vol. 33 No. 3, 203-219.
- Manik, E. H. (2016). Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 5, No.2 252-271.
- Mevis, P., & Verbaan, J. (2014). Legal Assistance and Police Interrogation (Problematic Aspects of Dutch Criminal Procedure in Relation to European Union and the Council of Europe. *Erasmus Law Review* Vol.7, No.4 , 175-190.
- Rochman, A. (2020). Legal Aid Institutions as a State Solution for the Poor in Getting Legal Protection. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* Vol.2 No.2 , 211-222.
- Perbawa, L. P., Sukawati, K., & Sukawati, M. P. (2020). Legal Assistance for The Poor. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 3 No. 1, 146-162.
- Rohmad, J. F., Sjaifurrachman, & Suhartono, S. (2021). Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka. *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 2, 1-20.

- Sahanggamu, H. V. (2013). Hak Tersangka untuk Mendapatkan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. *Lex Crimen* Vol. II No. 2 , 162-171.
- Sulistiono, E. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 2, 96-103.
- Syahara, T. P. (2021). Implementation of Legal Aid By The Local Government (Case Study of The Local Government of Jember Regency. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* Vol. 3 No. 4, 499-516.
- Thasia, N., Anindya, D. P., & Fermatasari, I. (2021). Urgensi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-VIII/2015. *Jurnal Led Suprema* Vol III No. 2, 731-746.
- Verhoeven, W. J. (2014). Perspective on Changes in the Right to Legal Assistance Prior to and During Police Interrogation. *Erasmus Law Review* Vol. 7 No.4, 171-174.
- Verhoeven, W.-J. (2018). The Complex Relationship between Interrogation Techniques, Suspects Changing Their Statement and Legal Assistance. Evidence from a Dutch Sample of Police Interviews. *Policing & Society*, Vol. 28, No. 3, 308-327.
- Wijanarko, D. S. (2018). Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Krtha Bhayangkara* Vol. 2 No. 3, 140-153.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Aturan :

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Konstitusi Amerika Serikat Tahun 1776.

Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI)

United Nations Development Programme UNODC “Early Access to Legal Aid in Criminal Justice Processes: A Handbook For Policymakers and Practitioners”

The European Commission Opinion on prevention of torture, inhuman or degrading treatment. *Acoch vs. Turkey*, N 22947/93 and N 22948/93 (2000 October 10)

United Nation, Treaty Series, vol. 999, No. 14668

Case :

Salduz v. Turkey, ECtHR Grand Chamber. (2008). No. 36391/02.

People (DPP) v. Madden (1977) IR 336.

Website :

An Garda Síochána, Code of Practice on Access to a Solicitor by Persons in Garda Custody (2015), at <https://www.garda.ie/en/about-us/publications/policy-documents/code-of-practice-on-access-to-a-solicitor-by-persons-in-garda-custody.pdf> yang diakses pada pukul 13.20 tanggal 21 Juli 2022.

“Pengertian Perlindungan Hukum,” <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukommenurut-para-ahli/> , diakses tanggal 21 Maret 2021

Hukum Online, Miranda Rules Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Diakses dari <http://www.hukumonline.com> yang diakses pada 18 Maret 2022 Pukul 13.21 WIB
Institute For Criminal Justice Reform, “SS vs. Negara Republik Indonesia”.
<https://icjr.or.id/ss-vs-negara-republik-indonesia/> yang diakses pada tanggal 4
Juli 2022 Pukul 10.54 WIB